

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Atribusi Audit

Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan- alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. *Fritz Heider* juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu, misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya daripada atribut eksternalnya. Teori atribusi audit digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui perilaku auditor dalam memberikan opini auditor. Dalam teori atribusi audit dikatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan. Teori atribusi dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini karena dalam penelitian ini akan diuji mengenai variabel-variabel yang dapat mempengaruhi ketepatan pemberian opini auditor yaitu skeptisme profesional yang merupakan kekuatan internal seorang auditor dan independensi sebagai faktor yang dapat dipengaruhi oleh pihak luar.

1. Independensi

Terdapat banyak definisi mengenai independensi telah dikemukakan oleh para pakar akuntansi. Umumnya definisi tersebut berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang masing-masing pakar yang pada gilirannya mengakibatkan perbedaan cakupan makna independensi.

Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (*Elfarini, 2007*). Dalam Kode Etik Akuntan Publik disebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Independensi menurut *Arens dkk (2008:111)* dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Independen dalam fakta (*independent in fact*) bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independen in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Akan tetapi independensi dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain.

Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pemeriksaan audit, evaluasi hasil audit dan penerbitan laporan audit. Dalam melaksanakan tanggung jawab audit suatu entitas, pemeriksa mungkin menghadapi tekanan atau konflik dari manajemen entitas yang diperiksa, berbagai tingkat jabatan pemerintah dan pihak lainnya yang dapat mempengaruhi objektivitas dan independensi pemeriksa pada saat mempertimbangkan tingkat materialitas.

Menurut (Arens, Elder dan Beasley,2009: 154) dalam Auditing and Assurance Service An Integrated Approach Tenth Edision, independensi dalam audit berarti cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit.

Menurut Standar Audit Pemerintahan 1995, independensi merupakan suatu pendapat, kesimpulan, pertimbanganatau rekomendasi dari hasil audit yang dilaksanakan secara tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak ketiga yang memiliki pengetahuan mengenai hal itu.

Sedangkan Menurut duska dalam bukunya Accounting Ethics (2013) Menuliskan bahwa "*The ISB defined auditor independence as freedom from those pressures and other factors that compromise, or can reasonably be expected to compromise, an auditor's ability to make unbiased audit decisions*". Dalam SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan negara) independensi ditekankan dalam paragraph 14 Pernyataan Standar umum kedua "Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya".

Dari beberapa definisi independesi tersebut diatas, di tarik simpulan bahwa independensi auditor merupakan suatu tindakan baik sikap perbuatan atau

mental auditor dalam sepanjang pelaksanaan audit dimana auditor dapat secara bebas dan tanpa tekanan dalam menjalankan semua kewajibannya serta tidak memihak oleh pihak - pihak yang berkepentingan terhadap hasil auditnya.

Menurut *Ruchjat Kosasih* (2000:47-48) ada empat jenis risiko yang dapat merusak independensi akuntan publik , yaitu :

- a) *Self interest risk*, yang terjadi apabila akuntan publik menerima manfaat dari keterlibatan keuangan klien.
- b) *Self review risk*, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan penugasan pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang dibuat untuk kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang mengarah pada produk atau pertimbangan yang mempengaruhi informasi yang menjadi pokok bahasan dalam penugasan pemberian jasa keyakinan.
- c) *Advocacy risk*, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi terlalu erat kaitanya dengan kepentingan klien.
- d) *Client influence risk*, yang terjadi apabila akuntan publik mempunyai hubungan erat yang kontinyu dengan klien, termasuk hubungan pribadi yang dapat mengakibatkan intimidasi oleh atau keramahtamahan (*familiarity*) yang berlebihan dengan klien.

Menurut *Arens* (2003:83) mengkategorikan independensi kedalam dua aspek yaitu:

- a) *Independensi in Fact* (Independensi dalam fakta)

Independensi dalam fakta (*independen in fact*) ada bila auditor benarbenar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias dan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.

- b) *Independensi in Appearance* (Independensi dalam penampilan)

Merupakan pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Meskipun auditor independen telah menjalankan audit secara independen dan objektif, pendapatnya yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independen bila tidak mampu mempertahankan independensi dalam

penampilan. Independensi dalam penampilan ditentukan oleh kesan masyarakat terhadap independensi akuntan publik secara maupun keseluruhan.

a. Independensi Pelaporan

Independensi Pelaporan adalah kebebasan auditor tanpa pengaruh dan kendali dari pihak lain dalam mengemukakan fakta hasil pengujian, kesimpulan, opini dan rekomendasi hasil audit.

b. Pentingnya Independensi

Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditorindependen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur. Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa sikap independensi auditor ternyataberkurang.

2. Pengetahuan Auditor

Herawaty (2008) menjelaskan seorang auditor bisa meperoleh pengetahuan dari berbagai pendidikan dan pelatihan formal serta non-formal seperti seminar, loka karya, serta pengarahan dari auditor senior kepada auditor juniornya. Pengetahuan juga diperoleh dari frekuensi seorang auditor melakukan proses audit, karena dengan semakin seringnya auditor melakukan audit, maka akan semakin bertambah pula hal-hal baru yang akan diketahuinya.

Menurut *Arens, et al.* (2010: 21), seorang auditor juga dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman di bidang industri yang digeluti kliennya. Pengetahuan akuntan publik digunakan sebagai salah satu kunci keefektifan kerja. Pengetahuan mengenai kemungkinan kekeliruan oleh seorang auditor akan berguna untuk membuat audit plan. Dalam audit, pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting untuk membuat perencanaan audit yang efektif (*Noviyani dan Bandi* 2002).

a. Faktor-faktor Pengetahuan Auditor

Menurut *Notoatmodjo* (2010), ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu:

1). Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumurhidup.

2). Media massa/sumber informasi

Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, internet, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini dan kepercayaan orang.

3). Sosial budaya dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk.

4). Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun social

5). Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan.

b. Komponen-Komponen Pengetahuan Audit

Secara umum ada komponen pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor menurut *Kusharyanti* (2010), yaitu:

1). Pengetahuan Umum

2). Pengetahuan Akuntansi dan Auditing

3). Pengetahuan Standar Pemeriksaan Penjelasan komponen- komponen pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor

3. Etika Profesi

Etika secara umum didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu (*Suraida, 2005:118*). etika dalam auditing adalah suatu prinsip untuk melakukan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang

informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria – kriteria yang dimaksud yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Tanpa etika, profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan auditor tidak melakukan kecurangan, sehingga dapat memberikan pendapat audit yang benar-benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, (Irayadi, 2011 dalam Lestari, 2015). Di Indonesia, penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh sekurang kurangnya enam unit organisasi, yaitu: Kantor Akuntan Publik, *Unit Peer Review* Departemen Akuntan Publik-IAI, Badan Pengawas Profesi Departemen Akuntan Publik-IAI, Dewan Pertimbangan Profesi IAI, Departemen Keuangan RI dan BPKP. Selain keenam unit organisasi tadi, pengawasan terhadap Kode Etik diharapkan dapat dilakukan sendiri oleh para anggota dan pimpinan KAP. Hal ini tercermin di dalam rumusan Kode Etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2, yang berbunyi (Martadi dan Sri, 2006:17).

Setiap anggota harus selalu mempertahankan integritas dan obyektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Dengan mempertahankan integritas, ia akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretense. Dengan mempertahankan obyektifitas, ia akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan/permintaan pihak tertentu/kepentingan pribadinya.

a. Perlunya Etika Profesi

Dasar pikiran yang melandasi penyusunan etika profesi setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut. Setiap profesi yang menyediakan jasanya untuk masyarakat memerlukan kepercayaan diri masyarakat yang dilayaninya. Umumnya masyarakat sangat awam mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh suatu profesi, karena kompleksnya pekerjaan yang dilaksanakan oleh profesi. Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya,

karena dengan demikian masyarakat akan terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Jika masyarakat pemakai jasa tidak memiliki kepercayaan terhadap profesi akuntan publik, dokter, atau pengacara maka layanan profesi tersebut kepada klien dan masyarakat pada umumnya menjadi tidak efektif. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu audit akan menjadi lebih tinggi jika profesi akuntan publik menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut.

b. Prinsip-Prinsip Etika Profesi Auditor

Prinsip etika profesi auditor dalam Kode Etik (IAI):

- 1). Tanggung Jawab Profesi
- 2). Kepentingan Publik
- 3). Integritas
- 4). Objektivitas
- 5). Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
- 6). Kerahasiaan
- 7). Perilaku Profesional
- 8). Standar Teknis

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan pasal 29 disebutkan bahwa wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Kode etik. Hal ini berarti semakin auditor mematuhi prinsip-prinsip etika profesi, maka akan terbentuk pertimbangan tingkat materialitas yang semakin wajar dan ideal.

4. Pertimbangan Tingkat Materialitas.

Menurut FASB no.2 materialitas adalah jumlah atau besarnya kekeliruan atau salah saji dalam informasi akuntansi yang berkaitan dengan kondisi yang bersangkutan, mungkin membuat pertimbangan pengambilan keputusan pihak yang berkepentingan berubah atau terpengaruh oleh salah saji tersebut. FASB

(The Financial Accounting Standard Board) menjelaskan konsep materialitas sebagai penghilangan atau salah saji suatu item dalam laporan keuangan adalah material jika dalam keadaan tertentu besarnya item tersebut mungkin menyebabkan pertimbangan orang yang reasonable berdasarkan laporan keuangan tersebut akan berubah atau terpengaruh oleh adanya pencantuman atau peniadaan informasi akuntansi tersebut. Definisi materialitas menurut Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI : 2011) SA Seksi 312 Materialitas merupakan besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal baik secara individual atau keseluruhan adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sedangkan beberapa hal lainnya adalah tidak penting. Arens (2005:234) menyatakan konsep materialitas menggunakan tiga tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat, antara lain :

- 1). Jumlah yang tidak material, jika terdapat salah saji laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material.
- 2). Jumlahnya material, tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan. Tingkat materialitas ini terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar sehingga tetap berguna
- 3). Jumlahnya sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Tingkat tertinggi terjadi jika para pemakai dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan.

Tujuan dari penetapan materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan mengumpulkan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah lebih banyak bukti yang dikumpulkan dari pada jumlah yang tinggi tetapi sedikit mengumpulkan bukti. Seringkali

mengubah jumlah materialitas dalam pertimbangan awal ini selama audit. Jika ini dilakukan jumlah yang baru tadi disebut pertimbangan yang direvisi mengenai materialitas. Sebab-sebabnya antara lain perubahan faktor-faktor yang digunakan untuk menetapkannya atau auditor berpendapat jumlah dalam penetapan awal tersebut terlalu kecil atau besar (*Hendro, 2006:8*). Dengan demikian tujuan penetapan materialitas sangat pengumpulan bahan bukti kompeten yang cukup. Langkah-langkah dalam menetapkan materialitas (*Arens 2005:233*) :

- 1). Tentukan pertimbangan awal mengenai materialitas
- 2). Alokasi pertimbangan awal mengenai materialitas ke dalam segmen
- 3). Estimasi total kekeliruan dalam segmen
- 4). Estimasi kekeliruan gabungan
- 5). Bandingkan estimasi gabungan dengan pertimbangan awal mengenai materialitas. penting untuk membantu auditor dalam merencanakan.

B. Hubungan Antar Variabel

1. Pengaruh independensi terhadap pertimbangan tingkat materialitas
Hasil Penelitian *Hasyim* (2013) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan pemberian opini audit. Hal ini terjadi karena seorang auditor yang tidak independen berarti tidak mempunyai kejujuran dalam dirinya dalam mempertimbangkan fakta, dapat memihak pada suatu kepentingan tertentu, informasi yang diberikan tidak objektif, dan tidak bebas dari pengaruh/bujukan/pengendalian dari pihak lain sehingga dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya dapat berpihak pada salah satu pihak tersebut. Menurut *Dilaga* (2015) seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi maka kinerjanya akan lebih baik dan dapat menghasilkan ketepatan pemberian opini audit yang lebih baik pula.
2. Pengaruh pengetahuan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas
Perbedaan pengetahuan di antara auditor akan berpengaruh terhadap cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan, seorang auditor akan

Bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan secara efektif jika didukung dengan pengetahuan yang dimilikinya (Sari, 2007 dalam kautsarrahmelia, 2013). Putri (2014) menjelaskan pengetahuan auditor akan sangat diperlukan dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan, karena auditor yang memiliki pengetahuan akan lebih mudah menentukan pertimbangan tingkat materialitas. Pengetahuan akuntan publik digunakan sebagai salah satu kunci keefektifan kerja. Dalam audit, pengetahuan tentang bermacam-macam pola yang berhubungan dengan kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan penting untuk membuat perencanaan audit yang efektif (Noviyani dan Bandi 2002) Seorang akuntan publik yang memiliki banyak pengetahuan tentang kekeliruan akan lebih ahli dalam melaksanakan tugasnya terutama yang berhubungan dengan pengungkapan kekeliruan. Pengertian mengenai kekeliruan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) paragraf 6, dinyatakan bahwa kekeliruan (error) berarti salah saji (misstatement) atau hilangnya jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat berupa (1) kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan; (2) Estimasi akuntansi yang tidak masuk akal yang timbul dari kecerobohan atau salah tafsir fakta; (3) Kekeliruan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi dan cara penyajian atau pengungkapan.

3. Pengaruh etika profesi terhadap pertimbangan tingkat meterialitas

Audit membutuhkan pengabdian yang besar pada masyarakat dan komitmen moral yang tinggi. Sedangkan Masyarakat menuntut untuk memperoleh jasa para auditor publik dengan standar kualitas yang tinggi, dan menuntut mereka untuk bersedia mengorbankan diri Jadi, dalam menjalankan pekerjaannya, seorang auditor dituntut untuk mematuhi Etika Profesi yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi persaingan diantara para akuntan yang menjurus pada sikap curang. Dengan diterapkannya etika profesi

diharapkan seorang auditor dapat memberikan pendapat yang sesuai dengan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi, semakin tinggi Etika Profesi dijunjung oleh auditor, Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang auditor dituntut untuk mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi semakin tinggi etika profesi seorang auditor maka pertimbangan tingkat materialitas akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian *Minanda* dan *Muid* (2013), *Idawati dan Eveline* (2016), Pratiwi dan Widhiyani (2017), yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

C. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh independensi, pengetahuan Auditor, dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas serta terdapat variabel-variabel lainnya. telah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh :

Tabel 2.1
Penelitian terlebih dahulu



No	Nama dan Judul	Variabel Penelitian	Hasil Peneliti an	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Suci Oktavia</i> (Jurnal: 2015) Pengaruh Independensi, Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Audit Laporan Keuangan dengan Etika Profesi sebagai Variabel Mode	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Independensi - Pengetahuan Auditor dalam Mendeteksi Kekeliruan <p>- Etika Profesi</p> <p>- pertimbangan tingkat materialitas</p> <p>Moderasi: Etika Profesi</p> <p>Dependen: Pertimbangan Tingkat Materialitas</p>	<p>1. Seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan.</p> <p>2. Interaksi etika profesi dan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat Materialitas</p>	<p>Variabel yang sama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Independensi - Pertimbangan Tingkat Materialitas 	<p>Variabel yang berbeda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etika Profesi sebagai variabel independen <p>Tempat Penelitian: KAP Jakarta selatan</p>
2	<i>Anny Sri Haryani</i> (Tesis: 2010) Pengaruh Pengetahuan Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan	<p>Independen:</p> <p>Pengetahuan Auditor</p> <p>Moderasi: Dimensi Independensi</p> <p>Dependen:</p>	<p>1. Pengetahuan auditor berpengaruh positif secara langsung terhadap dimensi Independensi.</p> <p>2. Dimensi</p>	<p>Variabel yang sama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan - Pertimbangan Tingkat Materialitas 	<p>Variabel yang berbeda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Independensi - Etika Profesi - Profesionalisme

	Laporan Keuangan melalui Dimensi Independensi	Pertimbangan Tingkat Materialitas	Independensi memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap tingkat materialitas. 3. Ada pengaruh Pengetahuan kerja auditor diukur tidak langsung terhadap tingkat materialitas dalam proses pengauditan melalui dimensi Independensi.		Tempat Penelitian: KAP Jakarta selatan
3	<i>Novanda Friska Bayu Aji Kusuma</i> (Skripsi: 2012) Pengaruh Independensi, Etika Profesi, dan Pengetahuan Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas	Independen: - Independensi Auditor - Etika Profesi - Pengetahuan Auditor Dependen: Pertimbangan Tingkat Materialitas	Pengaruh Independensi, Etika Profesi, dan Pengetahuan Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam audit laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan.	Variabel yang sama: - Independensi - Etika Profesi - Pengetahuan Pertimbangan Tingkat Materialitas	Variabel yang berbeda: - profesionalitas me Tempat Penelitian: KAP Jakarta selatan

4	<p><i>Siti Muzirah</i> (Naskah Publikasi: 2015) Pengaruh Profesionalisme Auditor, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan, dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas</p>	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesionalisme Auditor - Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan - Etika Profesi <p>Dependen:</p> <p>Pertimbangan Tingkat Materialitas</p>	<p>1. Independensi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.</p> <p>2. Pengetahuan mendeteksi kekeliruan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.</p> <p>3. Etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.</p>	<p>Variabel yang sama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesionalisme - Etika Profesi - Pertimbangan Tingkat Materialitas 	<p>Variabel yang berbeda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Independensi - Pengalaman <p>Tempat Penelitian: KAP Jakarta selatan</p>
5	<p><i>Luh Putu Ekawati</i> (Jurnal: 2013) Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman Kerja, dan Tingkat Pendidikan</p>	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesionalisme - Pengalaman Kerja - Tingkat Pendidikan 	<p>Profesionalisme, Pengalaman Kerja, dan Tingkat Pendidikan Berpengaruh positif signifikan</p>	<p>Variabel yang sama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesionalisme - Pengalaman - Pertimbangan Tingkat 	<p>Variabel yang berbeda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etika Profesi - Independensi <p>Tempat</p>

6	<p><i>Angga Agustianto</i> (Skripsi: 2013) Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman Auditor, Gender, dan Kualitas Audit terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan</p>	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesionalisme - Pengalaman Auditor - Gender - Kualitas Audit <p>Dependen:</p> <p>Pertimbangan Tingkat Materialitas</p>	<p>Profesionalisme, pengalaman auditor, gender dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan.</p>	<p>Variabel yang sama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesionalisme - Pengalaman - Pertimbangan <p>Tingkat Materialitas</p>	<p>Variabel yang berbeda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Etika Profesi - Independensi <p>Tempat Penelitian: KAP Jakarta selatan</p>
7	<p><i>Galeh Utami & Mahendra Adhi Nugroho</i> (Jurnal: 2014) Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, dan Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dengan Kredibilitas Klien sebagai</p>	<p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesionalisme - Etika Profesi - Pengalaman Auditor <p>Dependen:</p> <p>Pertimbangan Tingkat Materialitas Pemodera</p>	<p>1. Profesionalisme auditor berpengaruh signifikan dan negatif pada pertimbangan tingkat materialitas</p> <p>2. Tidak terdapat pengaruh signifikan etika profesi pada pertimbangan tingkat</p>	<p>Variabel yang sama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profesionalisme - Etika Profesi - Pengalaman - Pertimbangan <p>Tingkat Materialitas</p>	<p>Variabel yang berbeda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Independensi <p>Tempat Penelitian: KAP Jakarta selatan</p>

	Pemoderasi	si: Kredibilit as Klien	materialitas 3. Pengalaman auditor tidak berpengaruh pada pertimbangan tingkat materialitas		
8	<i>Yoga Satria Prima</i> (Skripsi: 2012) Pengaruh Etika Profesi, Independensi, dan <i>Professional Judgment</i> Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Audit Laporan Keuangan	Independen: - Etikaprofesi - Independensi - <i>Profesional Judgment</i> Dependen: Pertimbangan Tingkat Materialitas	Etika Profesi, Independensi, dan <i>Professional Judgment</i> berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam audit laporan keuangan baik secara parsial maupun simultan.	Variabel yang sama: - EtikaProfesi - Independensi - Pertimbang an Tingkat Materialita s	Variabel yang berbeda: - Profesionalism e - Pengalaman Tempat Penelitian: KAP Jakarta selatan
9	<i>Luh Putu Ekawati</i> (Jurnal: 2013) Pengaruh Profesionalisme, Pengalaman Kerja, dan Tingkat Pendidikan	Independen: - Profesionalism e - Pengalam an Kerja - Tingkat Pendidik an	Profesionalisme , Pengalaman Kerja, dan Tingkat Pendidikan Berpengaruh positif signifikan	Variabel yang sama: - Profesionalis m e - Pengalaman - Pertimbang an Tingkat	Variabel yang berbeda: - EtikaProfesi - Independensi Tempat

	Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas	Dependen: Pertimbang an Tingkat Materialitas	terhadap pertimbangan tingkat materialitas.	Materialita s	Penelitian: KAP Jakarta selatan
--	---	---	--	------------------	--

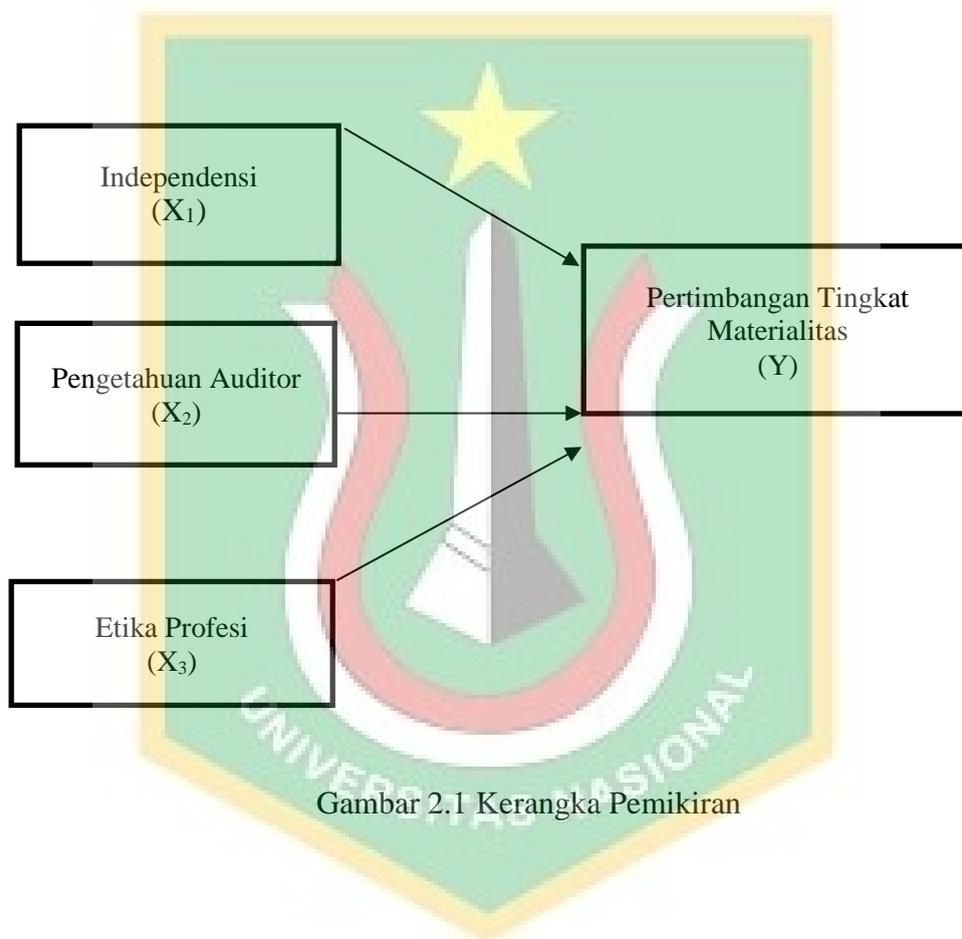
Sumber: Diolah oleh penulis

D. Kerangka Pemikiran

Etika profesi merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan pengaruh dalam menentukan tingkat materialitas. Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya (*Rahmawati & Hanun, 2015*). Prinsip-prinsip etika yang dirumuskan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan dianggap menjadi kode etik perilaku akuntan Indonesia adalah tanggung jawab, integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kesungguhan, kerahasiaan, dan perilaku profesional (*Amalia, 2017*). Menurut *Murtanto dan Marini (2003: 483)*, tanpa etika, profesi akuntan tidak lagi ada karena fungsi akuntan adalah sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis.

Untuk menentukan pertimbangan materialitas dalam proses audit laporan keuangan dibutuhkan akuntan publik yang independen dalam setiap penugasannya.

Independensi akuntan publik adalah syarat mutlak dalam pemeriksaan. Adapun kerangka pemikiran ini disederhanakan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis

Hipotesis atau hipotesa merupakan suatu pernyataan yang sifatnya sementara, atau kesimpulan sementara atau dugaan yang bersifat logis tentang suatu populasi. Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.

1. Pengaruh Independensi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas
Independensi dapat diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Hal ini akan mempengaruhi pertimbangan tingkat materialitas auditor, karena semakin kurangnya independensi seorang auditor akan semakin melemahnya pertimbangan tingkat materialitas auditor tersebut, begitu pula sebaliknya semakin bagusnya tingkat independensi seorang auditor akan semakin kuatnya pertimbangan tingkat materialitas seorang auditor (Tjun, 2012). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Idawati dan Eveline (2016), Kuncoro dan Ernawati (2017) menunjukkan hasil bahwa independensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diperoleh hipotesis yaitu:

H1: Independensi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

2. Pengaruh pengetahuan berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Pengetahuan terhadap Akuntan publik yang memiliki pengetahuan dan keahlian secara profesional dapat meningkatkan pengetahuan tentang sebab dan konsekuensi kekeliruan. Pengetahuan akuntan publik tentang pendeteksian kekeliruan semakin berkembang karena adanya pengalaman kerja. (Herawaty, 2009). Hasil penelitiannya yang bernilai positif dan signifikan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan berpengaruh secara positif terhadap pertimbangan materialitas. Sehingga semakin banyak pengetahuan tentang kekeliruan yang dimiliki oleh seorang auditor, maka akan semakin ahli dalam pengungkapan kekeliruan dalam suatu laporan keuangan. (Putri, 2014)

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2: Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan berpengaruh positif terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

3. Pengaruh Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Etika profesi merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab, pelaksanaan kode etik, penafsiran dan penyempurnaan kode etik (Kusuma, 2012). Setiap auditor juga diharapkan memegang teguh etika profesi yang sudah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, agar situasi persaingan tidak sehat dapat dihindarkan. Dengan menjunjung tinggi etika profesi diharapkan tidak terjadi kecurangan diantara para auditor, sehingga dapat memberikan pendapat audit yang benar-benar sesuai dengan laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Dalam menjalankan pekerjaannya, seorang auditor dituntut untuk mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Jadi semakin tinggi etika profesi seorang auditor maka pertimbangan tingkat materialitas akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Minanda dan Muid (2013), Idawati dan Eveline (2016), Pratiwi dan Widhiyani (2017), yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

